

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder* menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparansi mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Good Corporate Governance bukan hanya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, adapun menjelaskan tentang pelaksanaan audit internal yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Bahwa yang dimaksud dengan Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi keuangan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian Audit Internal perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi bertujuan untuk mengetahui apakah pembukuan dan laporan keuangan tersebut telah menunjukkan gambaran aktivitas sebenarnya dan untuk mengetahui apakah setiap bagian atau

unit benar-benar telah melaksanakan kebijakan rencana atau prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak.

Auditor merupakan profesi kepercayaan klien untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan auditan lainnya maka auditor dituntut menjadi seorang ahli. Klien dan para pemakai laporan keuangan auditan mengharapkan auditor mampu memberikan penilaian dan memberikan informasi mengenai kondisi laporan keuangan yang telah disajikan manajemen perusahaan. Penilaian terhadap laporan keuangan tersebut merupakan suatu upaya perwujudan terhadap tanggung jawab auditor sebagai pihak eksternal yang dinilai memiliki keahlian dan pengalaman untuk melakukan serangkaian prosedur audit yang bertujuan memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tidak mengandung kecurangan yang menyebabkan terjadinya salah saji yang material.

Selain keahlian audit, auditor juga membutuhkan pengalaman. Pengalaman seorang auditor menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor karena auditor yang lebih berpengalaman dapat mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan. Pengalaman audit ditunjukkan dengan jumlah penugasan praktik audit yang pernah dilakukan oleh auditor. Auditor harus memiliki kualifikasi teknis serta berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit, ini akan membuat auditor lebih dapat menemukan kecurangan dari klien yang mereka audit.

Laporan keuangan merupakan dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan tersebut sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus benar-benar mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara manajer sebagai pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

Pada umumnya, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan ekuitas yang disusun berdasarkan dasar akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi, sehingga dapat memodifikasi laporan keuangan untuk menghasilkan jumlah laba (*earnings*) yang diinginkan. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba atau *earnings management*.

Manajemen laba dapat dilakukan baik secara legal maupun tidak legal. Praktik legal artinya manajemen laba yang dilakukan tidak bertentangan dengan standar akuntansi yang ada seperti estimasi akuntansi, melakukan perubahan metode akuntansi, dan pergeseran periode pendapatan atau biaya. Sedangkan praktik manajemen laba yang illegal dilakukan dengan cara melaporkan transaksi pendapatan atau biaya secara fiktif dimana nilai dari transaksi tersebut ditambah

(*mark up*) atau dikurangi (*mark down*) atau mungkin dengan tidak melaporkan sejumlah transaksi sehingga akan menghasilkan laba pada nilai/tingkat tertentu yang dikehendaki.

Kasus penggelumbungan aset di PT. Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur Utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu.

Dalam laporan keuangan tahun 2008, diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelumbungan aset di tahun 2005 sebesar Rp. 5 miliar. Nilai Rp. 5 miliar tersebut terdiri dari dua proyek yang sedang berjalan, proyek yang pertama adalah proyek renovasi Kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%, nilai kontrak sebesar Rp. 13,8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai Rp. 3 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2008 saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja.

Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan Gelanggang Olah Raga Bulian Jambi. Nilai kontrak sebesar Rp. 33.998.000.000 dan PT. Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progress tersebut sebesar Rp. 2 miliar. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batang Hari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang, ada kasus pergantian bupati.

Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelumbungan aset pada tahun 2005. Tahun 2005 nilai aset PT. Waskita

Karya Persero adalah sebesar Rp. 1,6 triliun, dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar Rp. 5 miliar atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. (<http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis>)

Kecurangan Laporan Keuangan terjadi PT. PINDAD. Menurut Erik P. Hardi dalam perusahaan ini telah terjadi tindakan *markup* yang dilakukan oleh salah satu pejabat di perusahaan tersebut yaitu biaya pengadaan konduktor dan isolasi untuk perbaikan 3 generator oleh salah seorang pejabat pindad kemungkinan kerugian yang di perkirakan sebesar Rp. 1,35 miliar. (infokorupsi.com (2009))

Kecurangan lain yang terjadi pada tahun 2012, dikatakan oleh Abdul Rachman Baso dalam laporan yang didapat PT. PINDAD mengalami kerugian dengan 3 pucuk senjata laras pendek caliber Pada saat penyelidikan tersangka mengaku dalam menjalankan aksinya tersangka bekerja sama dengan rekannya yang sesama karyawan. Diindikasikan kerugian PT. PINDAD sekitar 350 juta. (infokorupsi.com (2012))

Pihak Kejaksaan Agung menahan dua pegawai kantor PT. Pos Indonesia terkait kasus dugaan korupsi pengadaan portabel data terminal tahun 2013, Selasa (2/12/2014). Kedua pegawai pos yang ditahan tersebut masing-masing berinisial BS dan M.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana yang dikonfirmasi membenarkan hal ini. "Benar, Direktur Teknologi PT. Pos berinisial

BS, ditahan. Ditahan pula pegawai PT. Pos berinisial M," kata Tony melalui pesan singkatnya, Selasa sore.

Menurut Tony, keduanya ditahan se usai pemeriksaan oleh penyidik kejakung. "Yang bersangkutan diperiksa sejak jam 10 pagi tadi," ujar Tony.

Seperti diketahui, kedua orang tersebut ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan portabel data terminal (PDT) tahun 2013 dengan nilai proyek Rp 50 miliar di PT. Pos Indonesia untuk tahun anggaran 2012-2013. Diduga telah terjadi kerugian negara terkait kasus ini. (Kompas.com - 02/12/2014, 19:07 WIB)

Kejaksaan Agung (Kejakung) kembali menetapkan delapan tersangka kasus PT. Pos Indonesia. Kedelapan tersangka ini diduga melakukan korupsi dalam jual beli batu bara dengan menggunakan dana PT. Pos sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 40 miliar.

Kedelapan tersangka ini adalah Kepala Pos Logistik Pusat dengan inisial ARR yang kini menjabat sebagai stah ahli Dirut PT. Pos beserta tiga anak buahnya. Empat tersangka lagi berasal dari rekanan yakni AN yang menjabat Direktur PT. Citra Persada Enegyrama, Tfkr yang menjabat Direktur Bumi Cipta Perkasa/General Manager PT. Tiara Cemerlang Mandiri, SD yang menjadi kuasa Direktur CV Aldarista dan HC yang menjabat kuasa direksi PT. Regency Logistik Service.

"Penetapan delapan tersangka saya lakukan Kamis sore, pengumumannya hari ini," tegas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy di Kejaksaan, Jakarta, Jumat (1/8).

Dalam kasus ini, ARR selaku Kepala Kepala Pos Logistik Pusat telah mengadakan kerjasama dengan manager area Pos Banjar Baru dan tiga tempat lain di luar Kalimantan Selatan untuk melakukan kegiatan pengangkutan batu bara.

Namun dalam pelaksanaannya, uang yang yang dikeluarkan dari Pos Logistik Pos untuk perdagangan batu bara. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 3 Keputusan Direksi Nomor : KD-67/Dirut/ 2007 tanggal 29 Oktober 2007. Yaitu bidang usaha PT Pos Logistik adalah perusahaan layanan logistik sebagai *suply chain management* (SCM) yang antara lain meliputi layanan pergudangan, transportasi dan *freight forwarding*.

"*Core bussines* pos logistik pergudangan, transportasi dan pengangkutan udara. Lha kok ini untuk jual beli batu bara. Uang hilang, batu bara nggak ada," tegas Marwan.

Keempat wilayah yang diduga korupsi yakni di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Lampung. "Di Kalsel, kerugian negaranya Rp. 28 miliar. Selain empat wilayah ini, kita juga kembangkan ke wilayah lain," tambah Marwan.

Kenapa tidak ditahan? Menurut Marwan, kedelapan tersangka ini akan dipanggil terlebih dulu. Untuk mencegah kedelapan tersangka kabur ke luar negeri, Kejagung sedang mengajukan pencekalannya. "Surat pencekalannya sudah saya tandatangani," imbuh Marwan.

Dengan penetapan delapan tersangka ini, sudah 20 tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pada 21 Juli lalu, tujuh tersangka termasuk Dirut

PT. Pos Hana Suryana ditahan Kejagung. Dua tersangka ditetapkan Kejati Kalsel. (Persda Network/Yuli Sulistyawan) (Kompas.com - 01/08/2008, 15:55 WIB)

Pihak dari luar PT. Pos Indonesia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi kasus penggunaan dana operasional nonbudgeter pada PT. Pos Indonesia Wilayah IV Jakarta. Dua saksi itu adalah Heradian Yoto, Head of Service ABN Amro Bank dan Elmi, Direktur Utama PT Usahajaya Fico Operasional. Pemeriksaan dilakukan Tim Penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang diketuai jaksa Sutopo Hendro, Jumat (8/8).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Bonaventura Daulat Nainggolan menyampaikan hal itu kepada wartawan. Dalam perkara tersebut, jaksa menetapkan 10 tersangka, termasuk mantan Kepala Kantor Pos Wilayah IV Jakarta Hana Suryana. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Hana menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pos Indonesia. Dugaan korupsi berkaitan dengan pemberian komisi oleh Kantor Pos Wilayah IV Jakarta kepada pelanggan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Operasional PT. Pos Indonesia tanggal 20 Maret 2003, komisi tersebut besarnya 3 persen, 4 persen, dan 5 persen. Namun, Kepala Kantor Pos Wilayah IV Jakarta memperbolehkan pemberian komisi 5-6 persen. Kemudian, dibuatkan kuitansi fiktif seolah-olah diterima pelanggan, padahal sesungguhnya yang menerima adalah pejabat atau pegawai kantor pos sendiri. (Kompas.com - 08/08/2008, 15:56 WIB)

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari R. Ait Novatiani (2012), dengan judul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Keandalan Laporan Keuangan dan Hayyuning Tyas (2011), dengan judul

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa, pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan banyak dipengaruhi berbagai faktor, terdapat berbagai indikator penting yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan salah satunya sistem pengendalian internal dan penerapan *good corporate governance*. Ketiganya memiliki fungsi dan tujuan yang dapat memberikan dampak bagi hasil penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN” (Studi Kasus pada PT. PINDAD)**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. PINDAD.
2. Bagaimana Pelaksanaan Audit Internal pada PT. PINDAD.
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada PT. PINDAD.
4. Bagaimana Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governanve* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT. PINDAD.

5. Bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT. PINDAD.
6. Bagaimana Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT. PINDAD.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh antara *Good Corporate Governance* dan Penerapan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. PINDAD.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Audit Internal pada PT. PINDAD.
3. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada PT. PINDAD.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT. PINDAD.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT. PINDAD.

6. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT. PINDAD.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan hal yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman yang akan menambah wawasan mengenai aplikasi ilmu teori yang penulis peroleh dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan guna untuk memenuhi syarat mengikuti Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh antara Penerapan *Good Corporate Governance* dan Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara fakta di lapangan dengan ilmu yang diteliti.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan saran bagi pihak manajemen perusahaan untuk lebih menjaga dan memperhatikan yang berhubungan dengan Penerapan *Good Corporate Governance* dan Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4. Pihak Lain

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen-dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan belajar bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai referensi dalam melakukan peneliian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan menjadi penambah ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi serta aplikasi dengan teori-teori lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada di dalam sebuah perusahaan.